

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kecamatan Kulo.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kantor Kecamatan Kulo LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat Kantor Kecamatan Kulo disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Target kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Kulo Tahun 2016, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 dan Rencana Kerja Tahun 2016. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi Pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKJ-IP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja masing-masing unit satuan kerja yang ada di Kecamatan Kulo.

Indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Kulo. Indikator Kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Kulo. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Kantor Kecamatan Kulo merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Kulo identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Kulo merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah sekitar 74, 96 Km². Kecamatan Kulo membawahi 6 desa yang secara geografis terletak di bagian utara ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jarak tempuh 20 Km². Penduduk Kecamatan Kulo, memiliki sisi hubungan sosial kemasyarakatan yang cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.

Pemerintah Kecamatan Kulo mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum, Urusan Keamanan dan Ketertiban, Urusan Kesejahteraan Rakyat, Urusan Perekonomian Pembangunan, Urusan Pelayanan Umum serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pemerintah Kecamatan Kulo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Melakukan pembinaan kesejahteraan sosial;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan pelayanan masyarakat;
- Mengkoordinasikan penatausahaan kecamatan;
- Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan unit pelaksana teknis; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kulo menyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKJ-IP) sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Camat kepada Bupati Sidenreng Rappang.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

ISU STRATEGIS

Dalam Pencapaian Kinerja Kecamatan Kulo dapat diidentifikasi beberapa aspek strategis yang menjadi aspek pendukung dalam pencapaian visi, misi, maksud dan tujuan Kecamatan Kulo. Selain itu permasalahan utama (*strategic issued*) yang bisa menjadi faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi tersebut.

1. Aspek Strategis.

Aspek strategis atau peluang yang sangat mendukung kelancaran Pemerintah Kecamatan Kulo dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

- Adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Pemerintah Kecamatan Kulo dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan Kulo untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- Tingginya dukungan stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah terlihat dari tingkat kehadiran disetiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Kulo;
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- Kondisi geografis Kecamatan Kulo yang datar dan jarak tempuh antar desa yang dapat dijangkau dengan mudah.
- Meningkatnya jumlah anggaran yang dikucurkan ke desa, sehingga desa lebih leluasa dalam membangun dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

2. Analisis ancaman atau tantangan (*Strategic Issued*)

Selain peluang yang diuraikan di atas terdapat pula ancaman-ancaman atau permasalahan-permasalahan yang menghambat pencapaian visi misi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi kecamatan kulo dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi,

tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan beberapa tantangan atau ancaman tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- Masih kurangnya pemahaman aparat kecamatan terhadap tupoksi sehingga menghambat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan terhadap aparat desa;
- Masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap tupoksi dan aturan-aturan yang terkait dengan pembangunan yang ada di desanya;
- Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan yang telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Diharapkan dinas terkait juga mengacu pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan.
- Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa belum difungsikan sesuai tupoksinya, sehingga masih banyaknya permintaan data yang terlambat. Kecamatan sebagai tim fasilitasi harus bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan memfasilitasi.

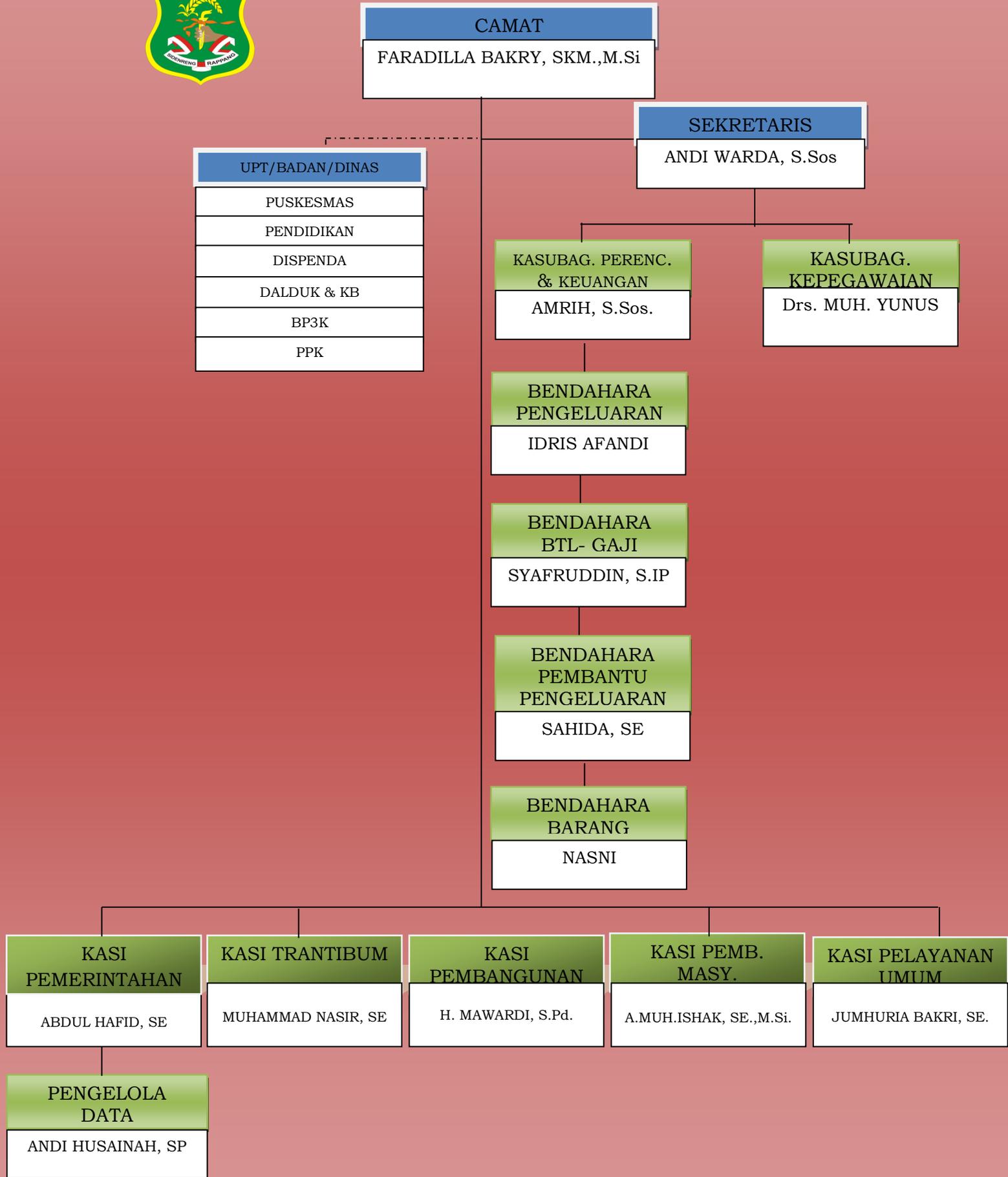
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN KULO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada angka 9 PP Nomor 9 Tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kulo dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi

PEMERINTAH KECAMATAN KULO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Kulo memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Kulo adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kulo memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut

Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Kantor Kecamatan Kulo memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Kulo terdiri dari 10 (Sepuluh) orang Laki-laki dan 9 (Sembilan) Orang Perempuan. Ke sembilan belas orang tersebut termasuk Sekretaris Desa, hal ini dijelaskan pada Gambar berikut ini :

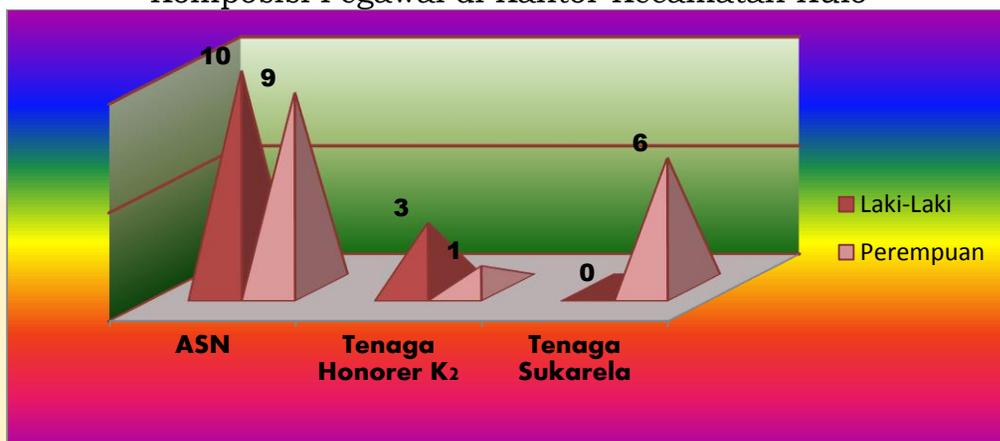
Gambar 2
Komposisi SDM Berdasarkan Gender



Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Kulo sangat terbatas dalam jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Ke sembilan belas tenaga ASN tersebut termasuk Sekretaris Desa yang lingkup tugasnya secara nyata berada di desanya masing-masing. Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Kulo dibantu oleh tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela.

Adapun tenaga honor dan tenaga sukarela ditugaskan untuk membantu penyelesaian tugas- tugas PNS sebanyak 10 Orang yang terdiri dari 4 orang tenaga honorer kategori K2 dan 6 orang sebagai tenaga sukarela, sehingga komposisi jumlah pegawai dan tenaga honorer dan sukarela digambarkan pada gambar di bawah ini :

Gambar 3
Komposisi Pegawai di Kantor Kecamatan Kulo



Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

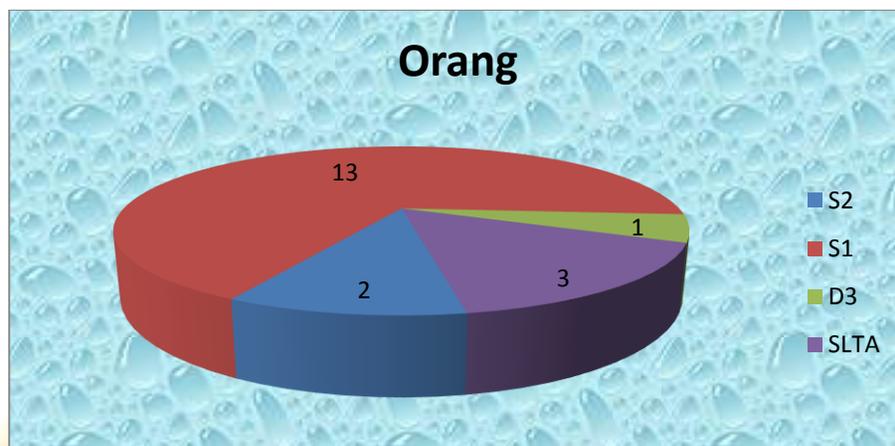
Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Kulo dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Kulo. Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Laki	Perempuan
1.	S2	2	1	1
2.	S1	13	7	6
3.	D3	1	0	1
4.	SLTA	3	2	1
JUMLAH		19	10	9

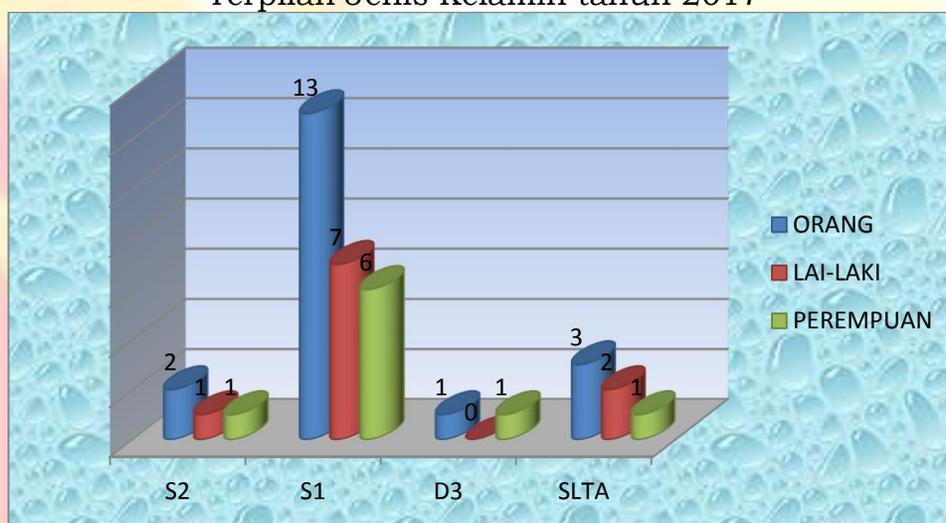
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan komposisi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut :

Gambar 4
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan



Sedangkan Komposisi PNS berdasarkan jenjang pendidikan dan terpilah menurut Jenis Kelamin digambarkan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 5
Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2017



Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Kulo sebanyak 9 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun PNS menurut jenjang eselon dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2
Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

NO.	NAMA	JK	JABATAN	ESELON
1.	Faradilla Bakry, SKM.,M.Si	P	Camat	III
2.	Andi Warda, S.Sos.	P	Sekcam	III
3.	Abdul Hafid, SE.	L	Kasi Pemerintahan	IVa.
4.	Andi Muhammad Ishak, SE.,M.Si	L	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IVa.
5.	Muhammad Nasir, SE.	L	Kasi Terantibum	IVa.
6.	H. Mawardi, S.Pd.	L	Kasi Pembangunan	IVa.

7.	Jumhuria Bakri, SE.	P	Kasi Pelayanan Umum	IVa.
8	Amrih, S.Sos.	P	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	IVb.
9.	Drs. Muhammad Yunus S.	L	Kasubag. Kepegawaian	IVb.

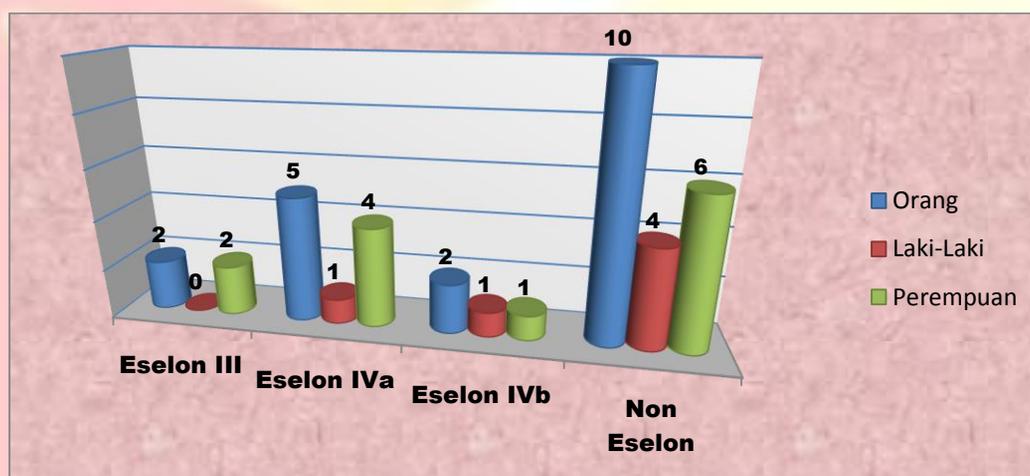
Sedangkan komposisi PNS yang non Eselon dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Komposisi PNS Non Eselon

NO.	NAMA	JK	JABATAN
1.	Andi Husainah, SP	P	Staf Pemerintahan
2.	Sahida, SE	P	Bendahara Pembantu BL
3.	Syafruddin, S.IP	L	Bendahara Pembantu BTL-Gaji
4.	Nasni	P	Bendahara Barang
5.	Idris Afandi, SE.	L	Bendahara Pengeluaran
6.	Sudirman P, SE	L	Sekdes Kulo
7.	Muzakkirah Labbang, S.IP	P	Sekdes Rijang Panua
8	Nurbaya, Bsc	P	Sekdes Maddenra
9.	Amiruddin, S.IP	L	Sekdes Bina Baru
10	Muhammad Saleng	L	Sekdes Mario

Berikut digambarkan Komposisi PNS menurut Jenjang Eselon sesuai dengan jenis kelamin sebagai berikut :

Gambar 6
Komposisi Jenis Kelamin menurut Jenjang Eselon dan dan Non Eselon



Komposisi PNS Menurut Golongan

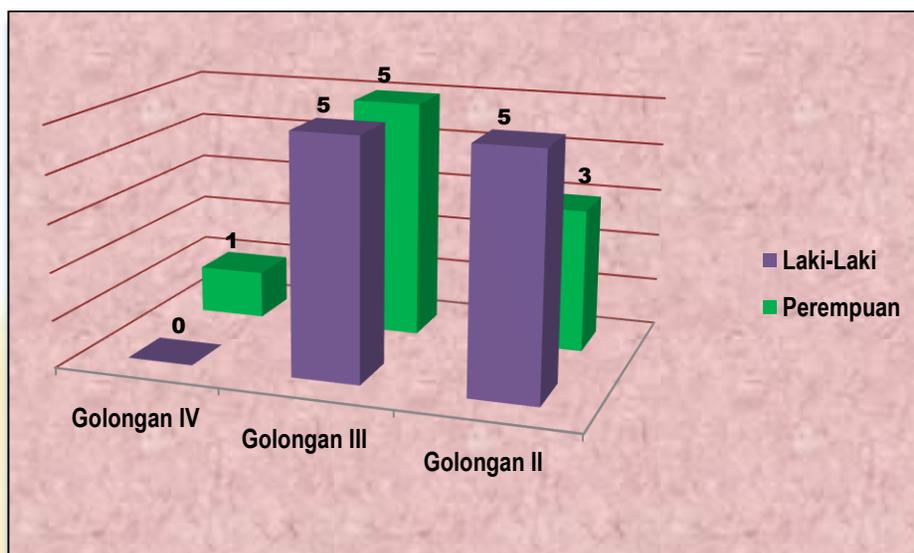
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kecamatan Kulo menurut golongan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4
Komposisi PNS Menurut Golongan

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan
1.	Golongan IV	0	1
2.	Golongan III	5	5
3.	Golongan II	5	3

Berdasarkan tabel di atas, dapat komposisi PNS Kantor Kecamatan Kulo per golongan menurut jenis kelamin digambarkan sebagai berikut :

Gambar 7
Komposisi Jenis Kelamin menurut Golongan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN KULO VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Kantor Kecamatan Kulo untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kantor Kecamatan Kulo, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Kantor Kecamatan Kulo, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Kantor Kecamatan Kulo yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI

Perencanaan stratejik (*strategic Palnning*) saat ini dianggap menjadi model baru dalam perencanaan. Pendekatan perencanaan yang awalnya diyakini sebagai ilmu kaum militer tersebut sela njutnya diterapkan pada organisasi atau perusahaan.

Organisasi publik seperti pemerintah mulai mengadopsi model perencanaan tersebut. Perencanaan strategis muncul sebagai paradigma alternatif dalam bidang perencanaan, menggantikan perencanaan lama, yakni perencanaan jangka panjang (*Long-Range Planning*) maupun perencanaan yang berstandar pada obyektivitas. Logika dasar perencanaan strategis adalah bahwa lingkungan dunia yang merubah secara pesat dan tak menentu memerlukan kemampuan untuk merubah perencanaan dan manajemen secara tepat, sehingga dituntut kemampuan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan eksternal dari organisasi serta upaya terus menerus menelaah kemampuan dan kelemahan internal menjadi prasyarat bagi organisasi agar tetap eksis dalam posisi yang strategis.

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Kecamatan Kulo memiliki keinginan untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng

Rappang dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis ini. Visi Kantor Kecamatan Kulo adalah :

“Mewujudkan Sistem Pelayanan Prima Yang Berlandaskan Prinsip-Prinsip Good Governance Menuju Kabupaten Sidenreng Rappang yang Maju Terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Meningkatkan Dua Kali Lipat.”

Visi di atas mengandung makna bahwa Kecamatan Kulo ingin mewujudkan pelayanan prima sebagai tujuan utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan mengedepankan sikap profesionalisme. Pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan ramah, cepat, transparan, mudah dan biaya relatif terjangkau. Selain itu makna yang terkandung dalam visi kecamatan kulo sebagai masyarakat maju dan sejahtera, berarti suatu keadaan dimana secara fisik dan non fisik kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama.

MISI

Misi merupakan pernyataan yang harus dicapai dan kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan. Apabila visi dipandang sebagai pemberi inspirasi sekaligus motivasi, maka misi dipandang sebagai acuan/langkah dalam pengambilan keputusan manajemen. Misi dapat mempresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi. Untuk mewujudkan Visi Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kantor Kecamatan Kulo, yaitu sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
- Mengembangkan sumber daya dan mendorong semangat profesionalisme serta peningkatan disiplin aparatur.
- Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan meliputi pembinaan keagamaan, pendidikan keterampilan masyarakat, kesehatan masyarakat dan sarana sosial kemasyarakatan lainnya.
- Melakukan pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban dengan koordinasi aparat keamanan yang terkait dalam wilayah

kecamatan.

- Melakukan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dengan dinas daerah dan instansi vertikal dalam wilayah kecamatan.

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi atau merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan yang ditetapkan Kantor Kecamatan Kulo dengan tupoksi yang secara kolektif menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tupoksi tersebut.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1 Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Tujuan :

- Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan serta memudahkan akses masyarakat terhadap pemberian pelayanan

Misi 2 Mengembangkan sumber daya dan mendorong semangat profesionalisme serta peningkatan disiplin aparatur

Tujuan :

- Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam upaya pencapaian visi organisasi

Misi 3 Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan meliputi pembinaan keagamaan, pendidikan keterampilan masyarakat, kesehatan masyarakat dan sarana sosial kemasyarakatan lainnya.

Tujuan :

- Meningkatkan kemampuan dan keberdayaan masyarakat dalam menemukenali permasalahan yang dihadapi serta mengupayakan secara mandiri untuk mengatasinya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki

Misi 4 Melakukan pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban dengan koordinasi aparat keamanan yang terkait dalam wilayah kecamatan.

Tujuan :

- Menciptakan suasana yang senantiasa kondusif dalam rangka kelancaran proses-proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kerukunan hidup ditengah-tengah masyarakat

Misi 5 Melakukan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dengan dinas daerah dan instansi vertikal dalam wilayah kecamatan.

Tujuan :

- Memberikan jaminan pelaksanaan serta program pembangunan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana dalam arti tepat waktu dan tepat sasaran dan berkualitas

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5
Tujuan dan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Kulo

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Tujuan 1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Lembar	200	1100
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	60
	Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan Dinas	Unit	1	5
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Unit	3	15
	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	60
	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Bulan	12	60
	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	Bulan	80	350
	Tersedianya Bahan Bacaan	Bulan	12	60
	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Bulan	12	63
	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Bulan	10	510
Tujuan 2	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kantor Lainnya.	Bulan	12	60
	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	102	141
	Tersedianya Peralatan Peralatan Gedung Kantor	Unit	0	4
	Tersedianya Mebeleur	Set	0	1
	Terpeliharanya Rumah Dinas secara berkala	Unit	1	5
	Terpeliharanya Gedung Kantor secara berkala	Unit	1	5
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	3	15	

	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	3	11
	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Unit	4	12
Tujuan 3	Tercapainya Lembaga Ekonomi Pedesaan	Bulan	12	60
	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Bulan	12	60
Tujuan 4	Tercapainya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Keg	6	30
Tujuan 5	Tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Laporan	4	15
	Tercapainya Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Bulan	12	60
	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Bulan	12	60

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang menjadi fokus pembangunan di Kecamatan Kulo dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri dari *Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timelines* (SMART). Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tahunan

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan serta memudahkan akses masyarakat terhadap pemberian pelayanan

Sasaran :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam upaya pencapaian visi organisasi

Sasaran :

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan 3 : Meningkatkan kemampuan dan keberdayaan masyarakat dalam menemukenali permasalahan yang dihadapi serta mengupayakan

secara mandiri untuk mengatasinya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki

Sasaran :

1. Meningkatnya Lembaga Ekonomi Desa
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Tujuan 4 : Menciptakan suasana yang senantiasa kondusif dalam rangka kelancaran proses-proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kerukunan hidup ditengah-tengah masyarakat

Sasaran :

1. Terpeliharanya Kemanan, Ketertiban dan Kenyamanan dan Masyarakat

Tujuan 5 : Memberikan jaminan pelaksanaan serta program pembangunan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana dalam arti tepat waktu dan tepat sasaran dan berkualitas

Sasaran :

1. Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten

Tabel 6
Sasaran dan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Kulo

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Sasaran 1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Lembar	200	1100
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	60
	Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan Dinas	Unit	1	5
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Unit	3	15
	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	60
	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Bulan	12	60
	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	Bulan	80	350
	Tersedianya Bahan Bacaan	Bulan	12	60

	Terlaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah	Bulan	12	63
	Terlaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Bulan	10	510
	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kantor Lainnya.	Bulan	12	60
Sasaran 2	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	102	141
	Tersedianya Peralatan Peralatan Gedung Kantor	Unit	0	4
	Tersedianya Mebeleur	Set	0	1
	Terpeliharanya Rumah Dinas secara berkala	Unit	1	5
	Terpeliharanya Gedung Kantor secara berkala	Unit	1	5
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	3	15
	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	3	11
	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Unit	4	12
Sasaran 3	Tercapainya Lembaga Ekonomi Pedesaan	Bulan	12	60
Sasaran 4	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Bulan	12	60
Sasaran 5	Tercapainya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Keg	6	30
Sasaran 6	Tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Laporan	4	15
Sasaran 7	Tercapainya Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Bulan	12	60
	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Bulan	12	60

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018, Kantor Kecamatan Kulo merencanakan program sebanyak 8 Program. Program tersebut diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ❖ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- ❖ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- ❖ Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- ❖ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

- ❖ Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
- ❖ Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- ❖ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 7
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Sasaran 1	Program 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran 2	Program 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran 6	Program 1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA) 2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun seiring dengan keterbatasan anggaran yang tidak dapat mencakup semua kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja 2018, maka Kantor Kecamatan Kulo telah menetapkan PK sebagai berikut :

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kulo Tahun 2018

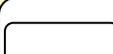
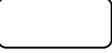
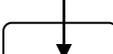
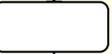
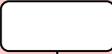
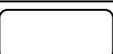
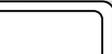
SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2018
Sasaran 1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Lembar	300
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12
	Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan Dinas	Unit	1

	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Unit	3
	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12
	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Bulan	12
	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	Buah	53
	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kali	10
	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kali	130
	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kantor Lainnya.	Bulan	12
Sasaran 2	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	26
	Tersedianya Peralatan Peralatan Gedung Kantor	Unit	10
	Terpeliharanya Rumah Dinas secara berkala	Unit	1
	Terpeliharanya Gedung Kantor secara berkala	Unit	1
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	3
	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Dinas	Unit	1
	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	8
Sasaran 6	Tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Laporan	2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*). Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengumpulan data kinerja beserta penanggung Jawab yang jelas. SOP IKU dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Camat	Sekcam	Kasubag.	Staf	Tim Sakip	Persyaratan kelengkapan	waktu	output	
1.	Memerintahkan untuk melaksanakan Pengumpulan data IKU									
2.	Sekretaris Tim mendisposisikan anggota tim untuk mengkoordinasikan Kasubag. Untuk mendapatkan data IKU dan memberikan arahan anggota tim sakip untuk penyusunan data IKU						Disposisi Perintah dan arahan	30 Menit	Masukan dan arahan untuk tim	
3.	TIM Sakip berkoordinasi dengan sekcam Kasubag dan staf						Bahan masukan IKU dari Sek.Tim berdasarkan data tahun sebelumnya	1 Hari	Bahan masukan data IKU dari masing masing bidang	SOP rapat internal
4.	Anggota tim menghimpun data IKU						Data masukan data IKU dari masing-masing bidang	1 Hari	Draf Dokumen IKU	
5.	Memeriksa dan mempelajari kembali hasil imput data IKU, jika setuju diasistensikan ke Camat, jika tidak setuju diserahkan kembali ke tim untuk diperbaiki						Draf Dokumen IKU	1 Hari	Draf dokumen IKU yang siap ke Camat	
6.	Memeriksa draf dokumen IKU jika setuju diparaf dan siap diajukan kepada Camat, jika tidak, diserahkan ke tim untuk diperbaiki						Draf Dokumen IKU yang siap diajukan ke Camat	1 Hari	Draf Dokumen yang sudah disetujui oleh Camat	
7.	Menerima dan menandatangani dokumen IKU						Draf dokumen IKU yang sudah disetujui Camat	1 Hari	Dokumen IKU yang sudah ditanda tangani	
8.	Mengagendakan, menggandakan dan mendistribusikan dokumen IKU						Dokumen IKU yang sudah ditanda tangani	30 Menit	Penggandaan dan pengiriman	

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Kantor Kecamatan Kulo telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 9
IKU Kantor Kecamatan Kulo

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	JUMLAH	SUMBER DATA
Sasaran 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	300	Revisi Renstra
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	Renstra
	Jumlah Jasa Jaminan Kendaraan Dinas	Unit	1	Renstra
	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Unit	3	Renstra
	Cakupan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	Renstra
	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Bulan	12	Renstra
	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	Buah	52	Renstra
	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kali	10	Renstra
	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kali	130	Renstra
	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kantor Lainnya.	Bulan	12	Renstra
Sasaran 2	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	26	Renstra
	Tersedianya Peralatan Peralatan Gedung Kantor	Unit	10	Renstra
	Terpeliharanya Rumah Dinas secara berkala	Unit	1	Renstra
	Terpeliharanya Gedung Kantor secara berkala	Unit	1	Renstra
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	3	Renstra
	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Dinas	Unit	1	Renstra
	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	8	Renstra
Sasaran 6	Tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Laporan	2	Renstra

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, anggaran yang direncanakan sebesar **Rp. 2.163.027.657,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.610.178.091,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 552.849.566,-, namun seiring dengan kondisi keuangan Pemerintah Daerah kegiatan yang telah

direncanakan pada awal penyusunan Renstra yang dijabarkan pada Rencana Kerja Tahun 2018, tidak dapat diakomodir secara maksimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **Dokumen Pelaksanaan Anggaran** Kantor Kecamatan Kulo dengan jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp.1.561.325.000** yang digunakan untuk membiayai **Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.222.465.000 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 338.860.000**. Seiring dengan tahun berjalan 2018, diadakan perubahan anggaran secara signifikan. Semua SKPD diharapkan untuk merasionalisasikan anggarannya yang dituangkan dalam Dokumen **Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2018**. Adapun anggaran perubahan tahun 2018 sebesar **Rp. 1.535.525.000,-** dengan rincian **Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.236.590.000,-** dan **Belanja Langsung sebesar Rp. 298.935.000,-**. Untuk Kecamatan Kulo pengurangan anggaran belanja berada pada Belanja Langsung sebesar (Rp. 39.925.000,-) sedangkan untuk Belanja tidak langsung mengalami peningkatan sebesar Rp. 14.125.000,-. Hal ini disebabkan oleh adanya Tambahan Penghasilan bulan Nopember dan Desember 2017 yang dibayarkan di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 14.125.000,- Adapun rinciannya sebagai berikut

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung | Rp. 14.125.000,- |
| 2. Belanja Pegawai | (Rp. 1.600.000,-) |
| 3. Belanja Barang dan Jasa | <u>(Rp. 38.325.000,-)</u> |
| | (Rp. 25.800.000,-) |

Berdasarkan penjelasan di atas Jumlah Anggaran Kecamatan Kulo Tahun Anggaran 2018 setelah dilakukan Rasionalisasi anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Rp. **1.236.590.000,- dan Belanja Langsung Rp. 298.935.000,- dengan Total Anggaran setelah Perubahan Rp. 1.535.525.000,-** Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

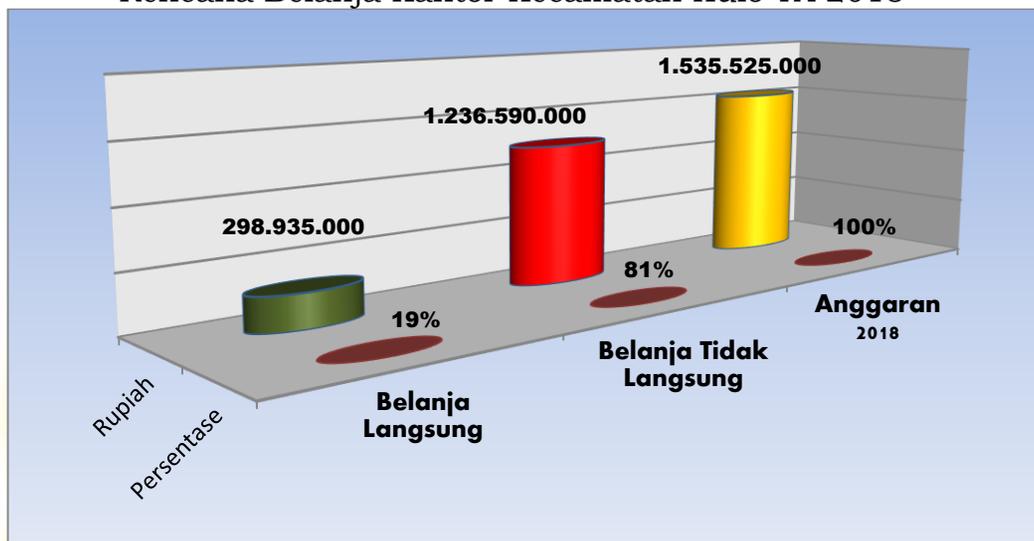
Tabel 10
Rencana Belanja Kantor Kecamatan Kulo TA 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.236.590.000,-	81
2	Belanja Langsung	298.935.000,-	19
Jumlah		1.535.525.000,-	100

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa alokasi dana untuk setiap SKPD lebih besar diperuntukkan untuk membiayai belanja pegawai sebesar 81 % sedangkan untuk belanja operasional setiap SKPD yang diperuntukkan mencapai

target sasaran indikator guna mencapai sasaran kinerja hanya sebesar 19 %. Adapun Rencana Belanja Kantor Kecamatan Kulo Tahun Anggaran 2018, dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

Gambar 8
Rencana Belanja Kantor Kecamatan Kulo TA 2018



Berdasarkan diagram di atas, sangat jelas bahwa alokasi anggaran sebagian besar memenuhi belanja pegawai yaitu sebesar 81 % sedangkan untuk belanja operasional hanya sebesar 19 %. Dengan adanya selisih antara pagu anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Bappeda melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu sebesar Rp. 601.702.657,- maka hal ini berimbas pada pencapaian Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal penyusunan Renstra. Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Untuk menyesuaikan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Sidenreng Rappang untuk alokasi Belanja Langsung, maka kami dari Pemerintah Kecamatan Kulo hanya dapat membiayai 3 sasaran kegiatan dari 7 sasaran kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kantor Kecamatan Kulo. Adapun sasaran yang dapat kami laksanakan di tahun 2018 adalah sebagai berikut

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Sasaran 6 : Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

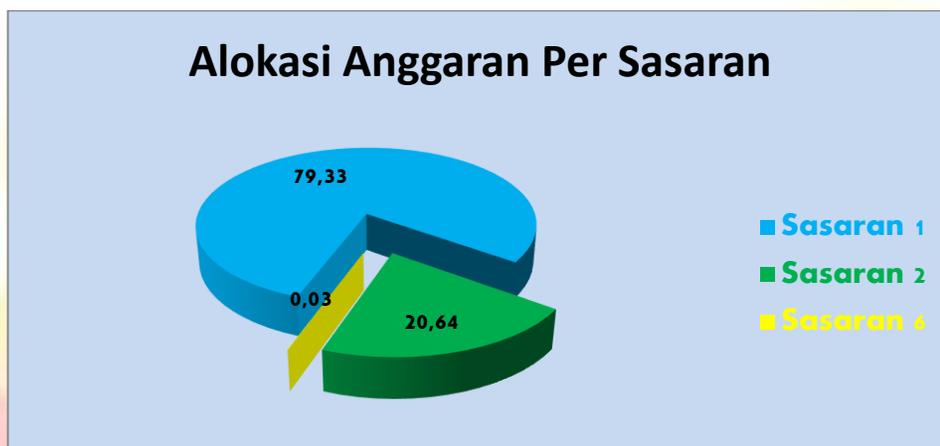
Tabel 11
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN
Sasaran 1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1.350.000,-	0,45
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.528.000,-	3,19
	Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan Dinas	4.500.000,-	1,51
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	1.300.000,-	0,43
	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	34.765.000	11,63
	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.415.000,-	2,81
	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	1.854.000,-	0,62
	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,-	13,38
	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,-	2,17
	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kantor Lainnya.	128.931.000,-	43,13
Jumlah Alokasi Anggaran Sasaran 1		237.143.000,-	79,33
Sasaran 2	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	7.185.000,-	2,40
	Tersedianya Peralatan Peralatan Gedung Kantor	1.340.000,-	0,45
	Terpeliharanya Rumah Dinas secara berkala	3.596.000,-	1,20
	Terpeliharanya Gedung Kantor secara berkala	16.403.000,-	5,49
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	28.800.000,-	9,63
	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	340.000,-	0,11
	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	4.030.000,-	1,35
Jumlah Alokasi Anggaran Sasaran 2		61.694.000,-	20,64
Sasaran 6	Tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	98.000,-	0,03
Jumlah Alokasi Anggaran Sasaran 6		98.000,-	0,03

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp **298.935.000** dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 1 dengan besaran 79,33 %. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran 2 yaitu sebesar 20,64 %. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran 3 sebesar 0,03 % dari total anggaran belanja langsung.

Berikut akan digambarkan melalui diagram Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018 untuk Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang :

Gambar 9
Alokasi Anggaran Per Sasaran



Adapun perbandingan alokasi penganggaran dari 2017 ke 2018 ada yang mengalami peningkatan pengalokasian dan Penurunan pengalokasian anggaran dana. Untuk Tahun 2017 besarnya anggaran adalah Rp. 308.860.000,- sedangkan anggaran untuk tahun anggaran 2018 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 298.935.000,-. Terkait anggaran dari 2017 ke 2018, mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada tahun 2018, dilakukan rasionalisasi anggaran dimana setiap SKPD diminta untuk merasionalisasi anggaran yang dianggap sudah tidak dapat lagi direalisasikan pada akhir tahun berjalan. Adapun perbandingan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel. 12
Perbandingan Alokasi Anggaran 2017 dan 2018

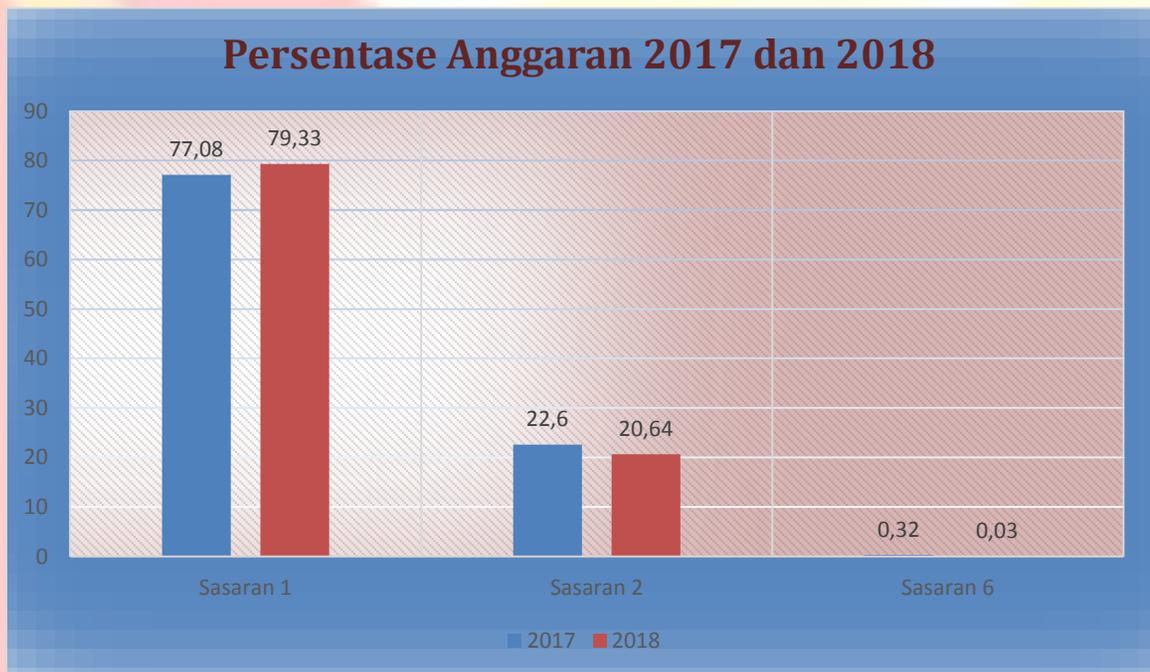
No.	Uraian	Anggaran (Rp)		Persentase (%)	
		2017	2018	2017	2018
1.	Sasaran 1	238.084.000,-	237.143.000,-	77,08	79,33
2.	Sasaran 2	69.769.000,-	61.694.000,-	22,60	20,64
3.	Sasaran 6	980.000,-	98.000,-	0,32	0,03
Jumlah		308.860.000,-	298.935.000,-		

Berdasarkan tabel di atas, maka Perbandingan pengalokasian anggaran untuk Kantor Kecamatan Kulo dari tahun 2017 ke tahun 2018 dapat digambarkan pada diagram berikut ini :

Gambar 10
Perbandingan Alokasi Anggaran 2017 dan 2018



Gambar 11
Persentase Alokasi Anggaran 2017 dan 2018



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN IKU

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018 Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Pencapaian kinerja IKU Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 13
Capaian IKU Tahun 2018

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN
1.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Lembar	300	300	100
2.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100

3.	Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan Dinas	Unit	1	1	100
4.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Unit	3	3	100
5.	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	100
6.	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Bulan	12	12	100
7.	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	Buah	53	53	100
8.	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kali	10	9	90,00
9.	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kali	130	67	51,54
10.	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kantor Lainnya.	Bulan	12	12	100
11.	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	26	26	100
12.	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Unit	10	10	100
13.	Terpeliharanya Rumah Dinas secara berkala	Unit	1	1	100
14.	Terpeliharanya Gedung Kantor secara berkala	Unit	1	1	100
15.	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	3	3	100
16.	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Dinas	Unit	1	1	100
17.	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	5	5	100
18.	Tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Laporan	2	2	100
Jumlah					96,75

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis untuk Tahun 2018 sebanyak 18 (Delapan Belas) indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Tabel 14
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Menilik dari skala nilai peringkat kinerja tersebut di atas, maka pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Kulo Tahun Anggaran 2018 dinilai telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, dengan tingkatan capaian sebesar 96,75 persen telah memenuhi kriteria. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

Tabel 15
Nilai Peringkat Kinerja Tahun 2018

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	KODE
1.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Lembar	300	300	100	ST
2.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100	ST
3.	Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan Dinas	Unit	1	1	100	ST
4.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Unit	3	3	100	ST
5.	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	100	ST
6.	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Bulan	12	12	100	ST
7.	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	Buah	53	53	100	ST
8.	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kali	10	9	90	T
9.	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kali	130	67	51,54	R
10.	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kantor Lainnya.	Bulan	12	12	100	ST

11.	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Gedung	Unit	26	26	100	ST
12.	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		Unit	10	10	100	ST
13.	Terpeliharanya Dinas secara berkala	Rumah	Unit	1	1	100	ST
14.	Terpeliharanya Kantor secara berkala	Gedung	Unit	1	1	100	ST
15.	Terpeliharanya Kendaraan Operasional	Dinas	Unit	3	3	100	ST
16.	Terpeliharanya Perlengkapan Dinas	Rumah	Unit	1	1	100	ST
17.	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	Gedung	Unit	5	5	100	ST
18.	Tercapainya Pengembangan Pelaporan Kinerja Keuangan	Sistem Capaian	Laporan	2	2	100	ST
Jumlah						96,75	

Berdasarkan tabel di atas, skala nilai peringkat kinerja Kantor Kecamatan Kulo untuk penilaian Sangat Tinggi (ST) sebanyak 16 indikator, Tinggi (T) 1 Indikator dan Rendah (R) 1 indikator. Dapat disimpulkan Skala Nilai Peringkat Kinerja Kantor Kecamatan Kulo Tahun Anggaran 2018 adalah Sangat Tinggi (ST).

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2018 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

- **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kantor Kecamatan Kulo untuk tahun 2018, Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 16
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Lembar	300	300	100
	2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100
	3. Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan Dinas	Unit	1	1	100
	4. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Unit	3	3	100
	5. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	100
	6. Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Bulan	12	12	100
	7. Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	Buah	53	53	100
	8. Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kali	10	9	90
	9. Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kali	130	67	51,54
	10. Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kantor Lainnya.	Bulan	12	12	100
Rata-rata capaian					94,15

Dari 10 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 8 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 2 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target secara maksimal. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran ini telah berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 94,15 persen.

- **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan

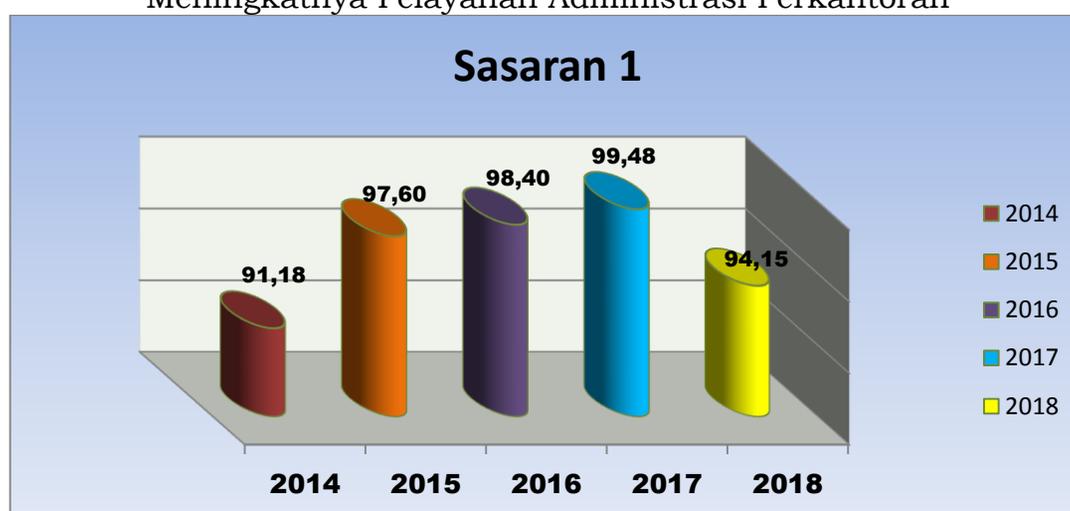
tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 17
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	100	100	100	100
2.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96	90	95	100	100
3.	Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan Dinas	100	100	100	100	100
4.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	87	86	99	96	100
5.	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100	100	100	100	100
6.	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	100	100	100	100	100
7.	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	100	100	100	100	100
8.	Tersedianya Bahan Bacaan	25	0	0	0	90
9.	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	96	100	95	98	51,54
10.	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99	100	96	100	100
11.	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kantor Lainnya.	100	100	99	100	100
Rata-Rata Capaian		91,18	97,60	98,40	99,48	94,15

Berdasarkan tabel di atas pencapaian sasaran 1 dengan perbandingan tahun sebelumnya meningkat dari tahun ke tahun. Namun ada satu indikator kinerja yang pada awal tahun perencanaan dilaksanakan, tapi seiring dengan berjalannya waktu indikator tersedianya bahan bacaan tidak dilaksanakan lagi dengan pertimbangan, kegiatan dimaksud telah dianggarkan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu untuk realisasi tahun 2018 mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan pencapaian realisasi tahun tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 diadakan Pemilihan Kepala Daerah, dimana terjadi pergantian kepala daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini memicu penyesuaian anggaran dari pemerintahan yang baru, sehingga setiap SKPD harus merasionalisasi anggaran yang dirasa tidak dapat lagi terlaksana diakhir tahun perencanaan. Pencapaian sasaran 1 dengan 11 indikator dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 12
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran



Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran** ini mengalami Penurunan. Pencapaian Kinerja untuk Tahun 2018 sebesar 94,15 % sedangkan untuk tahun 2017 sebesar 99,48 %. Besarnya penurunan target kinerja adalah (5,3 %.)

- **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisi terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis kantor kecamatan kulo :

Tabel 18

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Lembar	1100	1100	100
2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	60	100
3. Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan Dinas	Unit	5	5	100
4. Tersedianya Jasa Pemeliharaan	Unit	15	15	100

	dan Perizinan Kendaraan				
5.	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	60	60	100
6.	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Bulan	60	60	100
7.	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	Bulan	350	350	100
8.	Tersedianya Bahan Bacaan	Bulan	60	12	20
9.	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kali	63	62	98
10.	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kali	510	447	88
11.	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kantor Lainnya.	Bulan	60	60	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kantor Kecamatan Kulo, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan telah mencapai target kinerja, meskipun ada dua indikator yang tidak sampai kisaran 100 persen yaitu perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran** ini didukung indikator kinerja untuk sasaran tersebut bersentuhan langsung dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi program prioritas dalam penggunaan anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diharapkan di tahun yang akan datang, pencapaian target dari indikator indikator tersebut bisa lebih ditingkatkan antara lain dengan cara peningkatan sumber dana yang didukung pula dengan peningkatan sumber daya. Selain itu untuk meningkatkan capaian kinerja SKPD khususnya kecamatan, diharapkan pula kepada instansi yang terkait dalam penyusunan dan penetapan program kegiatan yang berimplikasi pada penetapan anggaran tetap mengacu pada RPJMD, Renstra dan Rencana Kerja yang telah disusun sehingga indikator indikator yang telah ditetapkan dapat mencapai target sesuai yang diharapkan.

Sedangkan beberapa indikator yang belum mencapai target lebih disebabkan pada dinamika penganggaran yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana banyaknya perencanaan yang telah disusun di awal penyusunan Renstra dan Penetapan Rencana Kerja namun dana yang diakomodir ke Kantor Kecamatan Kulo tidak sesuai dengan penganggaran yang

ada di Rencana Kerja Tahun 2018, sehingga ada beberapa target yang tidak dapat terpenuhi dengan maksimal.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdana.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran** ini adalah sebesar Rp. 269.768.000,- dan setelah perubahan anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 237.143.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 227.498.840 atau 95,93 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun lalu sebesar **99,48 berarti tingkat efisiensi sebesar (3,55%)**

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran** ini adalah sebanyak 1 program dan 10 kegiatan, yaitu : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran** tidak terdapat permasalahan yang berarti hal ini dibuktikan dengan pencapaian target kinerja yang hampir maksimal. Namun dengan melihat pencapaian sebesar 95,93% yang mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun lalu yaitu 99,48 %, maka dapat dijelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bahkan berada pada nilai kisaran Rendah (R). Kegiatan tersebut adalah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan capaian 52 %, hal ini disebabkan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas tidak membuat Laporan Kejadiannya dan SPJnya, sehingga pada akhir tahun terjadi penumpukan SPJ. Hal ini mengakibatkan tidak semua SPPD dapat tercover di pengajuan SPM akhir tahun. Selain Perjalanan Dinas Dalam Daerah, kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar 90 % untuk sasaran 1. Penurunan pencapaian target kinerja dari tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran yang berimbas pada keterlambatan pencairan anggaran oleh instansi terkait. Selain itu adanya pengajuan SPM yang telah dimasukkan ke BPKD tidak terakomodir di akhir tahun.

Berdasarkan beberapa kendala tersebut di atas, diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mengakomodir semua kegiatan yang telah dianggarkan untuk semua SKPD, terkhusus buat Kecamatan yang pengalokasian dananya sangat minim dibandingkan dengan Dinas/Badan.

2. SASARAN 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Dalam meningkatkan sasaran indikator sarana dan prasarana aparatur dengan membandingkan dengan pencapaian kinerja dari tahun tahun sebelumnya terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak dilaksanakan secara kontinyu sehingga berpengaruh pada pencapaian sasaran indikator kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kantor Kecamatan Kulo untuk tahun 2018, Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 19
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	26	26	100
	2. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Unit	10	10	100
	3. Terpeliharanya Rumah Dinas secara berkala	Unit	1	1	100
	4. Terpeliharanya Gedung Kantor secara berkala	Unit	1	1	100
	5. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	3	3	100
	6. Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	5	5	100
	7. Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	Unit	1	1	100
Rata-rata capaian					100

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa untuk pencapaian sasaran 2 dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Peningkatan Sarana dan Prasarana di lingkup Kantor Kecamatan Kulo telah tercapai sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan di awal perencanaan.

- **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

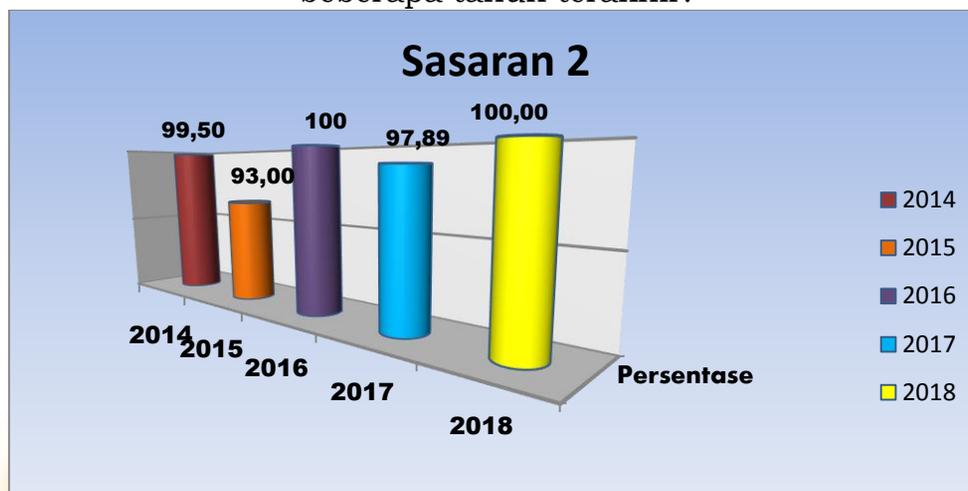
Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir, memuat capaian dari indikator-indikator kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun ini dan tahun tahun sebelumnya, dimana inidkator ini menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan pada sasaran meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran, hal ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 20
Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100	0	0	100	100
2.	Tersedianya Fasilitas Peralatan Kantor	0	100	100	100	100
3.	Tersedianya Mebeleur Kantor	0	0	0	100	0
4.	Terpeliharanya Rumah Dinas secara Berkala	100	100	100	100	100
5.	Terpeliharanya Gedung Kantor secara berkala	98	98	100	100	100
6.	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional secara berkala	99	67	100	94,91	100
7.	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Secara Berkala	100	0	0	0	100
8.	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan Secara Berkala	0	0	0	0	100
9.	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor secara berkala	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian		99,50	93,00	100	97,89	100

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan setiap tahunnya, diantaranya penyediaan perlengkapan Kantor, Penyediaan Mebeleur, pemeliharaan Perlengkapan Kantor dan Pemeliharaan Berkala Rumah Dinas/Jabatan Kegiatan ini disesuaikan dengan kondisi perlengkapan Kantor Kecamatan Kulo. Dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran 2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur selalu mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan dari tahun ke tahun. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat digambarkan pada diagram berikut ini :

Gambar 13
Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur** ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Rata-rata capaian kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 97,89 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar 2,11 persen.

- **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban Negara dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran Negara, yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diimplementasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis kantor kecamatan kulo :

Tabel 21

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	141	141	100
2.	Tersedianya Fasilitas Peralatan Kantor	Unit	14	14	100
3.	Terpeliharanya Rumah Dinas secara Berkala	Unit	5	5	100
4.	Terpeliharanya Gedung Kantor secara berkala	Unit	5	5	100
5.	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional secara berkala	Unit	15	15	100
6.	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan Secara Berkala	Unit	1	1	100
7.	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Secara Berkala	Unit	8	8	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kantor Kecamatan Kulo, maka Indikator-indikator tersebut sebagian besar tidak mencapai target jangka menengah sampai dengan tahun keempat periode Renstra telah tercapai dengan baik

• **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Penurunan beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur** ini disebabkan adanya indikator kinerja untuk sasaran tersebut tidak dapat dilaksanakan di dua tahun terakhir yaitu penyediaan perlengkapan kantor yang berimbas pula pada pemeliharaan perlengkapan kantor. Beberapa kegiatan tersebut tidak tercapai target kinerjanya karena kurangnya dana untuk membiayai seluruh kegiatan yang telah disusun di awal tahun penyusunan renstra. Faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja yaitu tingginya target yang telah ditetapkan di awal penyusunan renstra tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan yang mungkin tidak maksimal di tahun tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diharapkan di tahun yang akan datang, pencapaian target dari indikator indikator tersebut bisa lebih ditingkatkan antara lain dengan cara peningkatan sumber dana yang didukung pula dengan peningkatan sumber daya. Selain itu untuk meningkatkan capaian kinerja SKPD khususnya kecamatan, diharapkan pula kepada instansi yang terkait dalam penyusunan dan penetapan program kegiatan yang berimplikasi pada penetapan anggaran tetap mengacu pada RPJMD, Renstra dan Rencana Kerja yang telah disusun sehingga indikator indikator yang telah ditetapkan dapat mencapai target sesuai yang diharapkan.

Sedangkan beberapa indikator yang belum mencapai target lebih disebabkan pada dinamika penganggaran yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana banyaknya perencanaan yang telah disusun di awal penyusunan Renstra dan Penetapan Rencana Kerja namun dana yang diakomodir ke Kantor Kecamatan Kulo tidak sesuai dengan penganggaran yang ada di Rencana Kerja Tahun 2018, sehingga ada beberapa target yang tidak dapat terpenuhi dengan maksimal.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2018 untuk sasaran 2 **Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**, dapat dilihat dari realisasi kinerja untuk tahun 2018. Pencapaian sasaran 2 Sangat Tinggi (ST) yaitu di atas 91. Besarnya realisasi kinerja untuk tahun 2018 adalah 100 %. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 97,89 %. Efisiensi penggunaan sumber daya meningkat sebesar 2,11 %. Sedangkan realisasi anggaran untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 67.394.000,- dan setelah perubahan anggaran menurun menjadi Rp. 61.694.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 56.934.579 atau 92,29 persen.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menjadi indikator dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur** ini adalah sebanyak 1 program dan 8 kegiatan, yaitu : **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**.

Dalam pencapaian sasaran 2 **Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**, dalam pengukuran keberhasilan kinerja dinilai sangat tinggi karena telah menyentuh kisaran 100 %. Namun dalam segi realisasi anggaran untuk sasaran 2 terdapat penurunan penyerapan anggaran yaitu dari 97,89 % menjadi 92,29 %. Adapun yang menjadi kendala berada pada

kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional. Permasalahan yang dihadapi pada pencapaian sasaran ini tidak berbeda jauh dengan kendala yang dihadapi pada pencapaian sasaran 1, yaitu adanya Pengajuan Surat Permintaan Membayar (SPM) yang telah diajukan tetapi tidak diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dananya (SP2D) sehingga untuk merealisasikan anggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat terlaksana.

• **SASARAN 6 : Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kantor Kecamatan Kulo untuk tahun 2018, Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 22
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terciptanya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1. Tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Laporan	2	2	100
Rata-rata capaian					100

Pencapaian sasaran telah berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 100 persen. Pada kegiatan tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan setiap tahunnya selalu mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun tetap sama. Yaitu Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan rencana Kerja Perubahan Anggaran.

- **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun 201 dan beberapa tahun terakhir dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 23

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	100	100	100	100	100
	Rata-Rata Capaian	100	100	100	100	100

Realisasi capaian untuk sasaran 6, **Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel** dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun ini sama sebesar 100 persen, hal ini disebabkan oleh kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya jelas dan terukur. Realisasi Capaian **Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel** dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Gambar 14

Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel



- **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai

dengan analisi terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis kantor kecamatan kulo :

Tabel 24

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	Laporan	15	15	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kantor Kecamatan Kulo, kondisi kinerja target jangka menengah sebanyak 15 laporan dengan realisasi sampai dengan tahun 2018 sebanyak 13 laporan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan dari sasaran Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel adalah kegiatan yang dilaksanakan tiap tahunnya adalah kegiatan rutin.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel** ini adalah sebesar Rp. 980.000,- dan setelah perubahan anggaran menurun menjadi Rp. 98.000,-. Adapun yang mendasari pengurangan yang cukup signifikan adalah pelaksanaan penyusunan laporan tidak dibarengi dengan honorarium Panitia, hal ini dikarenakan efisiensi penggunaan dana. Berdasarkan anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 98.000,- atau 100 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **100 berarti tingkat efektifitas sebesar 100%.**

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program kegiatan yang mendukung sasaran Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Dalam pencapaian **sasaran Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel**, yang menjadi kendala dalam penyelesaian laporan yang di minta dari SKPD terkait terkadang tidak memiliki Juknis yang bisa menjadi acuan dalam penyelesaian laporan yang di minta. Terkadang pula juknis yang dibagikan ke setiap SKPD tidak disertai dengan penjelasan yang memungkinkan para Kasubag. Perencanaan memahami dengan baik tata cara penyusunan laporan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mengharapkan kepada instansi terkait dengan penyusunan laporan untuk memberikan penjelasan yang lebih efektif dan lebih dimengerti oleh kami sehingga memudahkan dalam penyelesaian tepat waktu, selain itu diharapkan adanya pendampingan dalam penyusunan laporan.

REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Tidak ada satu instansi pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Sistem penganggaran yang selama ini diterapkan di Indonesia yaitu sistem anggaran tradisional yang terkesan sangat kaku, birokratis, dan hierarkis sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia internasional yang sangat pesat, sehingga sudah selayaknya kalau sistem penganggaran tersebut diganti dengan sistem penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja (Belch, 2004)

Setiap pemerintahan memiliki suatu anggaran pendapatan dan belanja, baik tingkat pusat maupun daerah. Perencanaan suatu anggaran umumnya meliputi masa waktu satu tahun. Faktor distribusi, stabilisasi, dan alokasi

sangat perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu anggaran. Penyusunan anggaran memiliki fungsi yang bersifat integratif dan bersinergi antar komponen dalam pengalokasian anggaran. Dalam hal fungsi anggaran menjadi begitu penting untuk dapat terlaksananya pembangunan ekonomi suatu daerah. Di sisi lain anggaran memiliki banyak kelemahan yang bersifat umum, baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selain kelemahan tersebut penyusunan suatu anggaran akan menghadapi berbagai kendala, seperti *political context*, *legal context*, *economic conditions*, dan *historical context* (Purbadharmaja, 2007).

Penggunaan anggaran dalam pembangunan diharapkan memberikan manfaat tidak saja untuk meningkatkan pendapatan, namun juga diharapkan dapat memberikan ruang gerak ekonomi yang lebih kondusif dan menyentuh akar masalah yang faktual dalam masyarakat. Balai Taman Nasional Siberut sebagaimana dimaksud adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Tata Kerja Balai Taman Nasional Siberut mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang konservasi hutan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan No. 5/1990 tentang taman nasional.

Penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban Negara dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran Negara, yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 95,18 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran 6 yaitu 100 %, kemudian disusul oleh Sasaran 1 sebesar 95,93 % dan Sasaran 2 sebesar 92,29 %. sebagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat

bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 25
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Realisasi %	Target	Realisasi	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	300 Lbr	300 Lbr	100	1.350.000	1.350.000	100
2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	12 Bln	100	9.528.000	8.523.420	89,46
3	Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	100	4.500.000	4.486.920	99,71
4	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	3	3	100	1.300.000	1.130.000	86,96
5	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12	12	100	34.765.000	34.765.000	100
6.	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12	12	100	8.415.000	7.415.000	88,12
7	Tersedianya Alat dan Listrik Elektronik	53	53	100	1.854.000	1.854.000	100
8	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	10	9	90	40.000.000	38.213.000	95,53
9	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130	67	51,54	6.500.000	3.350.000	51,54
10	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kantor Lainnya.	12	12	100	128.931.000	126.411.000	98,05
11	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	26	26	100	7.185.000	7.185.000	100

12	Tersedianya Peralatan Peralatan Gedung Kantor	10	10	100	1.340.000	1.340.000	100
13	Terpeliharanya Rumah Dinas secara berkala	1	1	100	3.596.000	3.596.000	100
14	Terpeliharanya Gedung Kantor secara berkala	1	1	100	16.403.000	16.403.000	100
15	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	3	3	100	28.800.000	24.040.579	83,47
16	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	1	1	100	340.000	340.000	100
17	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	5	5	100	4.030.000	4.030.000	100
18.	Tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	2	2	100	98.000	98.000	100
				96,75			95,18

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 3 Sasaran dan 18 indikator sasaran, menunjukkan pencapaian 100%, yaitu sebanyak 16 sasaran indikator, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, telah mencapai kinerja sebanyak 94,15 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 95,18 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100 %, dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 92,29 %.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun efisiensi penggunaan sumber dana kantor kecamatan kulo di tahun anggaran 2018 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 26
Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Sasaran 1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	100	100
2		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	89,46	89,50
3		Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan Dinas	100	99,71	99,71
4		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	100	86,96	86,96
5		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100	100	100
6	Sasaran 2	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	100	88,12	88,12
7		Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	100	100	100
8		Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	90,00	95,53	94,21
9		Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51,54	51,54	51,54
10		Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kantor	100	98,05	98,05
11	Sasaran 2	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100	100	100
12		Tersedianya Peralatan Peralatan Gedung Kantor	100	100	100
14		Terpeliharanya Rumah Dinas secara berkala	100	100	100
15		Terpeliharanya Gedung Kantor secara berkala	100	100	100

16		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	100	83,47	83,47
		Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	100	100	100
17		Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	100	100	100
18	Sasaran 6	Tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100	100	100



RENCANA AKSI

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

No.	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output/Keluaran	Program	Kegiatan	Anggaran
		I	II	III	IV				
1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√	Jumlah Dokumen Bermaterai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.350.000,-
		√	√	√	√	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.528.000,-
			√			Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	4.500.000,-
		√		√		Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.300.000,-
		√	√	√	√	Waktu Penyediaan Jasa Keuangan		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	34.765.000,-
		√	√	√	√	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan kantor		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.415.000,-
			√	√		Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	1.854.000,-
		√	√	√	√	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	40.000.000,-
		√	√	√	√	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	6.500.000,-
		√	√	√	√	Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran		Pelayanan Administrasi Perkantoran	128.931.000,-

2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√		Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	7.185.000,-
			√			Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan		Pengadaan Peralatan gedung Kantor	1.340.000,-
				√		Jumlah rumah dinas/Jabatan yang dipelihara		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	3.596.000,-
			√	√		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	16.403.000,-
		√	√	√	√	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28.800.000,-
			√			Jumlah dan jenis Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	340.000,-
		√	√		√	Jumlah dan jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.030.000,-
	Menciptakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel		√			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98.000,-

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Kantor Kecamatan Kulo juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kulo. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Kecamatan Kulo pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena terdapat 13 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 5 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Kantor Kecamatan Kulo untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Kulo ke depan. Bagi instansi di lingkungan Kantor Kecamatan Kulo sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Kantor Kecamatan Kulo untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
KANTOR KECAMATAN KULO
TAHUN 2017**

LAPORAN KINERJA

LKJ

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kecamatan Kulo 2017 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kecamatan Kulo Tahun 2017 merupakan pencapaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2014-2018. LKj Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2014-2018).

LKj Kantor Kecamatan Kulo disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017. Penyusunan LKj Kantor Kecamatan Kulo Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kecamatan Kulo. Komitmen dalam penyusunan LKj Kantor Kecamatan Kulo, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Kecamatan Kulo untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Kantor Kecamatan Kulo Tahun 2017 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kantor Kecamatan Kulo. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Kulo pada tahun 2017, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Kulo, 22 Januari 2018
CAMAT KULO

FARADILLA BAKRY, SKM.M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19740115 200003 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Kantor Kecamatan Kulo melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kantor Kecamatan Kulo untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Kantor Kecamatan Kulo untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Kantor Kecamatan Kulo Tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kecamatan Kulo

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kantor Kecamatan Kulo ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kantor Kecamatan Kulo di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	3
Isu Strategis	4
Struktur Organisasi	5
Komposisi SDM Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
Rencana Strategis	11
Visi dan Misi	11
Tujuan dan Indikator Kinerja	13
Sasaran dan Indikator Kinerja	15
Program untuk Pencapaian Sasaran	17
Perjanjian Kinerja Tahun 2017	18
Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
Rencana Anggaran Tahun 2017	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
Capaian Kinerja Organisasi	28
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	28
B. Capaian Kinerja organisasi	30
C. Realisasi Anggaran	44
Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

NO.	TABEL	URAIAN	HAL.
1	Tabel 1	Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan	8
2.	Tabel 2	Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon	9
3.	Tabel 3	Komposisi PNS Non Eselon	9
4.	Tabel 4	Komposisi PNS Menurut Golongan	10
5.	Tabel 5	Tujuan dan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Kulo	14
6.	Tabel 6	Sasaran dan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Kulo	16
7.	Tabel 7	Ptogram untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017	18
8.	Tabel 8	Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kulo Tahun 2017	19
9.	Tabel 9	IKU Kantor Kecamatan Kulo	23
10.	Tabel 10	Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kulo TA 2017	24
11.	Tabel 11	Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2017	26
12.	Tabel 12	Capaian IKU	28
13.	Tabel 13	Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
14.	Tabel 14	Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun ini Sasaran 1	31
15.	Tabel 15	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir sasaran 1	32
16	Tabel 16	Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisnorganisasi Sasaran 1	36
17.	Tabel 17	Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun ini Sasaran 2	37
18.	Tabel 18	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir sasaran 2	38
19.	Tabel 19	Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisnorganisasi Sasaran 2	40
20.	Tabel 20	Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun ini Sasaran 6	41
21.	Tabel 21	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir sasaran 6	41
22.	Tabel 22	Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisnorganisasi Sasaran 6	42
23.	Tabel 23	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	44
24.	Tabel 24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46

DAFTAR GAMBAR

NO.	TABEL	URAIAN	HAL.
1	Gambar 1	Struktur Organisasi	6
2.	Gambar 2	Komposisi SDM Berdasarkan Gender	7
3.	Gambar 3	Komposisi Pegawai di Kantor Kecamatan Kulo	7
4.	Gambar 4	Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan	8
5.	Gambar 5	Komposisi PNS Per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2017	9
6.	Gambar 6	Komposisi Jenis Kelamin Menurut Jenjang Eselon dan Non Eselon	10
7.	Gambar 7	Komposisi Jenis Kelamin Menurut Golongan	10
8.	Gambar 8	Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kulo TA 2017	23
9.	Gambar 9	Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2017	27
10.	Gambar 10	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir sasaran 1	32
11.	Gambar 11	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir sasaran 2	37
12.	Gambar 12	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir sasaran 6	42